

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Konsep Organisasi masyarakat

A.1. Pengertian Peranan

Sebelum berbicara mengenai peranan ada baiknya untuk mengetahui tentang interaksi sosial yang merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Interaksi sosial menurut Soerjono Soekanto, merupakan dasar proses sosial yang terjadi karena adanya hubungan-hubungan sosial yang dinamis mencakup hubungan antara individu, antar kelompok, atau antara individu dan kelompok.³

Dari interaksi sosial inilah yang mempunyai hubungan antara peranan-peranan dan ada tiga hal yang tercakup dalam peranan. Ketiga hal tersebut adalah:

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁴

Sesuai penjelasan di atas interaksi sosial ini, mempunyai hubungan/ saling keterkaitan dengan peranan. Jika ada interaksi sosial, maka pasti disebabkan

³ Carapedia.com/pengertian_definisi_interaksi_sosial_menurut_para_ahli_info965.html. (diakses pada tanggal 5 september 2012 pukul 15:47).

⁴ Kun Maryati dan Juju Suryawati, *Sosiologi Untuk SMA Kelas X*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 70.

karena adanya peranan-peranan antar individu. Lebih lanjutnya Singgih menjelaskan tentang pengertian peranan, menurutnya:

Peranan (role) adalah aktivitas seseorang atau beberapa orang atau sesuatu lembaga yang dengan kekuasaannya mampu membuat hal-hal yang positif bagi semua pihak.⁵ Jadi, peranan menurut Singgih bisa dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang atau bahkan suatu lembaga. Dengan kekuasaannya seseorang atau suatu lembaga tersebut bisa memberikan pengaruhnya.

Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status. Peranan adalah perilaku yang diharapkan oleh pihak lain dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya.⁶ Status dan peranan tidak dapat dipisahkan karena tidak ada peranan tanpa status dan sebaliknya tidak ada status tanpa peranan. Dalam kehidupan sehari-hari, peranan menjadi penting karena berfungsi untuk mengatur perilaku seseorang. Contohnya, seseorang tidak bisa menjebloskan orang lain ke dalam penjara kalau ia tidak memiliki kedudukan sebagai hakim.

Peranan juga memiliki fungsi bagi individu maupun orang lain, fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1). Peranan seseorang dapat berfungsi sebagai alat pertahanan kelangsungan struktur masyarakat, misal peran sebagai ayah.
- 2). Peranan seseorang dapat pula berfungsi untuk membantu orang yang tidak mampu dalam masyarakat, misalnya peran sebagai Dokter, LSM, bahkan Ormas.

⁵ Singgih Gunarsa, *Psikologi untuk Keluarga*, (Jakarta: Berkah, 1976)

⁶ *Ibid*, h. 71

3). Peranan yang dimainkan seseorang juga merupakan sarana aktualisasi diri.⁷

Dari pemaparan di atas mengenai peranan dapat disintesis bahwa seseorang yang memiliki kekuasaan, pasti mempunyai peranan lebih dalam setiap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh penguasa tersebut, Sebab status dan peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat, serta kesepakatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Semakin banyak status dan peranan seseorang semakin beragam pula interaksinya dengan orang lain.

A.2. Pengertian Organisasi Masyarakat

Organisasi masyarakat atau disingkat ormas adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia untuk bentuk organisasi berbasis massa yang tidak bertujuan politis. Bentuk organisasi ini digunakan sebagai lawan dari istilah partai politik. Organisasi masyarakat dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan, misalnya: agama, pendidikan, sosial.⁸

Sedangkan menurut Undang-undang nomor 8 Tahun 1985 bab I, pasal 1 tentang pengertian Organisasi Masyarakat adalah:

“organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.”⁹

⁷ Kun Maryati dan Juju Suryawati, *Sosiologi Untuk SMA Kelas XI*, Jakarta: Erlangga, 2007), h. 26

⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_massa, (Diakses pada tanggal 5 september 2012 pada pukul 15:47)

⁹ S. Sapto Ajie, *Undang-undang nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat*, (Semarang: Aneka Ilmu), 1988, h. 2

Selain itu dalam terminology, organisasi masyarakat memiliki istilah sangat luas dan pada batas-batas tertentu mencerminkan nilai kompetitif. Dalam bahasa Inggris meliputi beberapa istilah yaitu:

*voluntary agencies/organisations, non-government organisation (NGO), private voluntary organization (PVO), community (development) organization, 'social action groups, non-party group, micro or people's movement.*¹⁰

(sukarela lembaga / organisasi, non-pemerintah (LSM), organisasi sukarela swasta (OSS), masyarakat (pembangunan) organisasi, 'kelompok aksi sosial, non-partai, kelompok mikro atau gerakan rakyat.)

Sejalan dengan pendapat diatas dapat disintesisakan mengenai pengertian organisasi masyarakat yaitu sebagai wadah untuk mencapai tujuan yang sama, organisasi masyarakat juga mempunyai tujuan ,visi dan misi yang jelas, organisasi masyarakat memegang peranan penting dalam suatu masyarakat, karena organisasi masyarakat dapat membantu/ mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam lingkungan & kehidupannya. Organisasi masyarakat bisa juga disebut kumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan.

Organisasi itu sendiri merupakan alat untuk mencapai ideologi dengan politik atau cara tertentu. Untuk mencapai tujuan (ideologi) dan melalui cara (politik) tertentu tidak mungkin dilakukan secara sendiri-sendiri tanpa

¹⁰ Theresia Rifeni Widiartati, *Keberadaan organisasi-tinjaun*, FH UI, 2010.
(<http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/131445-T%2027548-Keberadaan%20organisasi-Tinjaun%20literatur.pdf>), h. 29 (diakses pada tanggal 5 september 2012 pada pukul 20:00)

kepemimpinan, anggota atau tanpa dukungan masyarakat yang luas. Maka sebuah organisasi diperlukan sebagai alat yang menyatukan kekuatan setiap anggotanya, masyarakat dan kepemimpinan dalam satu komando bersama.¹¹

Pendapat diatas sesuai dengan teori kemasyarakatan sebagaimana dikemukakan oleh Oran Young yang dikutip oleh Arbi Sanit bahwa, "Teori kemasyarakatan yang disusun oleh kaum pluralism menggambarkan bahwa masyarakat bukanlah tersusun dari individu, akan tetapi dibentuk oleh kelompok yang dianggap sebagai unit dasar dari masyarakat."¹²

Konsep masyarakat yang dikutip oleh Arbi Sanit itu searah dengan pemikiran dari pada Von Savigny sebagaimana dikutip oleh Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang bahwa: Rakyat sebagai sebuah kesatuan individu yang beraneka ragam (kepentingan, kebutuhan, cita-cita, dan lain-lainnya) hidup dalam keteraturan.¹³

Jadi, teori kemasyarakatan yang dikemukakan oleh Oran Young menjelaskan pembentukan masyarakat dari kelompok-kelompok dan pembentukan kelompok oleh individu bukan karena terjadinya perhimpunan antar kelompok ataupun antar individu tersebut. Akan tetapi masyarakat terbentuk karena aktivitas kelompok yang diwujudkan di dalam interaksi antar kelompok. Serta konsep rakyat yang dikemukakan oleh Von Savigny tersebut bersumber dari dinamika kerakyatan yang terwujud dalam kebudayaan dan keseniannya, istilah rakyat mengacu pada entitas kebangsaan. Dalam hal ini konsep rakyat dilihat sebagai kesatuan semangat, tetapi bukan sekedar kumpulan individu-individu karena individu-individu secara satu-persatu tidak memiliki makna sama sekali jika dihadapkan pada istilah rakyat. Berdasarkan konsep Von Savigny mengenai kesatuan dapat diartikan, kesatuan tersebut bersifat begitu alamiah dan terjadi

¹¹ *Ibid*, h. 30

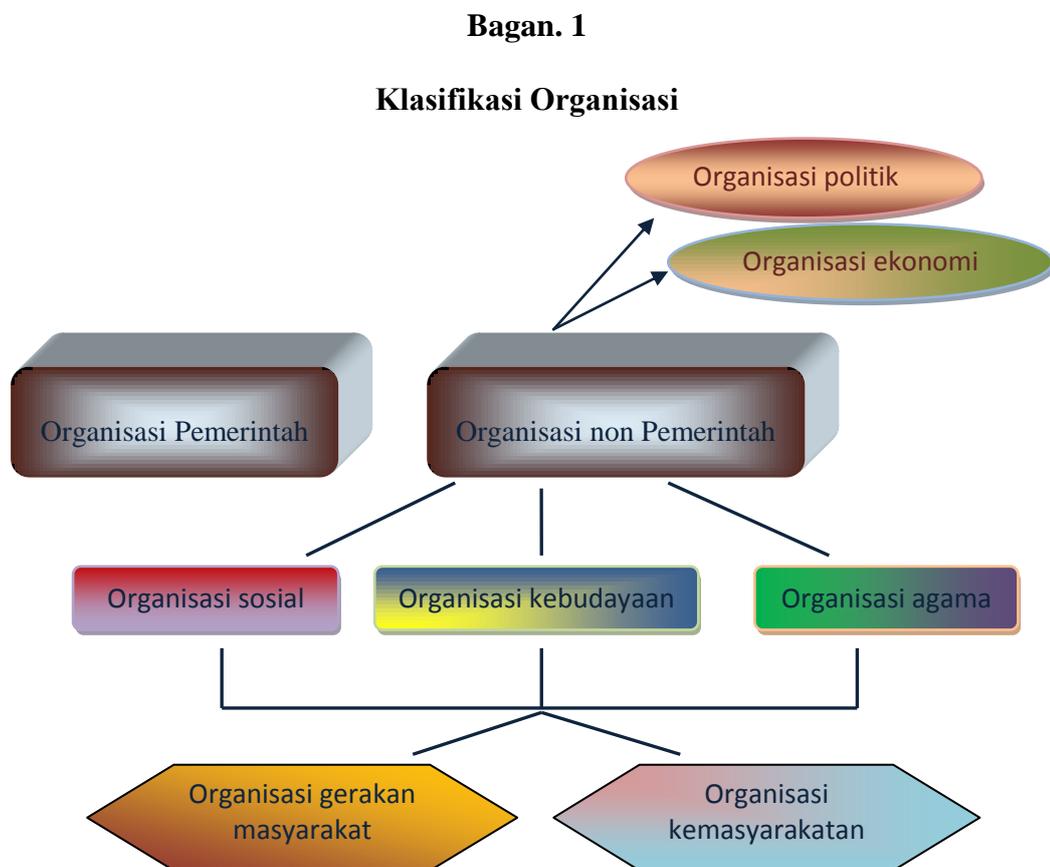
¹² *Ibid*, h. 31

¹³ *Ibid*, h. 31

dalam proses historis yang evolutif. Kesatuan itu menjadi layaknya individu yang mempunyai cita-cita, kehendak dan semangat. Ada jiwa yang menghidupi dan di dalamnya terdapat tarik-menarik kepentingan dan keharmonisan sebagai akibat dari relasi yang ada.

A.3. Klasifikasi Organisasi

Klasifikasi yang umum digunakan di kalangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membedakan antara organisasi pemerintah dengan organisasi non pemerintah. Secara prinsipil perbedaan di antaranya terletak pada keanggotaan, kewenangan mengatur, keabsahan menghukum dan penggunaan kekerasan.¹⁴. Berikut ini merupakan bagan klasifikasi organisasi:



¹⁴ *Ibid*, hlm. 34

Sesuai bagan diatas dapat dijelaskan bahwa Organisasi non pemerintah tersebut melahirkan beragam organisasi dalam 3 bidang, yaitu bidang sosial, budaya dan agama, dari ketiga bidang itulah muncul organisasi gerakan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

Sebagaimana telah diketahui bahwa aktivitas organisasi masyarakat berkaitan langsung dengan kepentingan seluruh anggota atau pendukung organisasi itu sendiri maka sesuai dengan ilustrasi bagan di atas untuk dapat mengetahui basis masing-masing organisasi masyarakat berdasar aspek kehidupan maka Arbi Sanit menguraikan lebih lanjut dalam tabel di bawah ini:

Tabel. 2

Klasifikasi Organisasi Masyarakat berdasar Aspek Kehidupan

Organisasi Masyarakat	Aspek Kehidupan
Organisasi Politik	Mengacu kepada kekuasaan negara baik dalam rangka memperoleh manfaat darinya, maupun dalam rangka menguasainya.
Organisasi Ekonomi	Mencari keuntungan materi berdasarkan tata cara berinteraksi yang didasarkan kepada perhitungan untung rugi.
Organisasi Sosial, Kebudayaan dan Agama	Memusatkan perhatian untuk merealisasikan dan melindungi kepentingan masyarakat tanpa mencari keuntungan materi untuk anggota dan organisasi tersebut dan bukan untuk memegang kendali atas kekuasaan negara.

Jadi, sesuai tabel diatas tentang organisasi politik contohnya dalam aspek kehidupan yaitu sebagai partai politik seperti; Golkar, partai demokrat, PDI, dll. Jika dalam organisasi ekonomi contohnya; PT dan CV. Serta jika organisasi sosial contohnya; HMI, FBR; organisasi kebudayaan seperti; PARFI (Persatuan Artis Film Indonesia), HSBI (Himpunan Seniman Budayawan Indonesia) organisasi agama seperti; FPI, NU dan lain-lain.

A.4. Tujuan dan Fungsi Organisasi Masyarakat

Setelah dijabarkan tentang pengertian organisasi masyarakat dan klasifikasi organisasi, maka penting juga mengetahui tujuan dan fungsi dari organisasi masyarakat.

a. Tujuan Organisasi Masyarakat

- Tujuan organisasi masyarakat lebih spesifik, jelas, dan operasional sehingga mudah dikenali baik oleh anggota maupun oleh masyarakat yang hendak digerakkan. Keperluannya ialah supaya tujuan tersebut menjadi kenyataan dan dirasakan oleh masyarakat dalam waktu yang tidak terlalu lama.
- Tujuan organisasi masyarakat biasanya diformulasikan secara umum, bermakna luas dan mempesona, walaupun belum operasional. Tujuan itu diharapkan dapat mencakup kalangan yang luas dan selanjutnya anggota masyarakat luas yang dicakup tersebut menyadari akan persatuan mereka.¹⁵

¹⁵ *Ibid*, hlm. 42

Selain itu menurut Undang-undang nomor 8 Tahun 1985, pasal 3 tentang Asas dan tujuan, yaitu:

“Organisasi kemasyarakatan menetapkan tujuan masing-masing sesuai dengan sifat kekhusussannya dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”¹⁶

b. Fungsi Organisasi Masyarakat

Undang-undang nomor 8 Tahun 1985, pasal 5 menjelaskan tentang fungsi organisasi. Fungsi itu terdiri atas 4 point, yaitu:

- Wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya,
- Wadah pembinaan dan pengembangn anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi,
- Wadah peran serta dalam usaha menyukkseskan pembangunan nasional,
- Sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggota dan/atau antar organisasi kemasyarakatan dan antar organisasi kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, badan permusyawaratan/perwakilan rakyat dan pemerintah.¹⁷

¹⁶ S. Sapto. Ajie, *loc. cit*, h. 3

¹⁷ S. Sapto. Ajie, *ibid*, h. 4

B. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat merupakan element yang kuat dalam menyokong sebuah pembangunan serta menjadi pendorong masyarakat agar menjadi manusia yang lebih berguna, maka dalam pengertian Pemberdayaan Masyarakat dapat dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut;

Menurut Goulet, (dalam Kartasasmita, 2005) menjelaskan istilah pemberdayaan yaitu, merupakan terjemahan dari istilah empowerment. Di Indonesia istilah pemberdayaan sudah di kenal pada tahun 1990-an di banyak NGOs, baru setelah konferensi Beijing 1995 pemerintah menggunakan istilah yang sama. Dalam perkembangannya istilah pemberdayaan telah menjadi wacana publik dan bahkan seringkali dijadikan kata kunci bagi kemajuan dan keberhasilan pembangunan masyarakat. Paradigma pemberdayaan adalah paradigma pembangunan manusia, yaitu pembangunan yang berpusat pada rakyat merupakan proses pembangunan yang mendorong prakarsa masyarakat berakar dari bawah.¹⁸ Ada pun pendapat dari Jim Ife yang dikutip Suharto (197:214) menurutnya pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris empowerment, yang secara harfiah bisa diartikan sebagai “Pemberkuasaan”, dalam arti pemberian atau peningkatan kekuasaan kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung.¹⁹

Menurut Goulet dan Jim Ife tentang Pemberdayaan memiliki arti empowerment yang diartikan sebagai pemberkuasaan atau bisa dikatakan kekuasaan yang memiliki kekuatan, kekuasaan kepada masyarakat lemah. Jim Ife juga membagi 3 bidang, sosial-ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Selain itu Robert Chambers, (dalam Kartasasmita, 1997:10) berpendapat tentang pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat *people centered*, *participatory*, *empowering* and *sustainable*.²⁰

¹⁸ Alfitri, *Community Development: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 21

¹⁹ *Ibid*, h. 22

²⁰ *Ibid*, h. 22

Pendapat Robert mengacu pada konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai sosial, karena pada dasarnya nilai ekonomi saling berhubungan dalam hal pembangunan masyarakat dan nilai sosial tercantum di dalamnya.

Sedangkan menurut Jackie Ambadar (2008), konsep pemberdayaan masyarakat terbagi dua hal, yaitu “pemberdayaan” dan “masyarakat”. Secara singkat, pemberdayaan atau pengembangan merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Bidang-bidang pembangunan biasanya meliputi 3 (tiga) sektor utama, yaitu ekonomi, sosial (termasuk di dalamnya: bidang pendidikan, kesehatan dan sosial-budaya), dan bidang lingkungan. Sedangkan masyarakat dapat diartikan dalam dua konsep, yaitu masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama”, yakni sebuah wilayah geografi yang sama.²¹

Menurut Jackie Ambadar Pemberdayaan Masyarakat meliputi 3 sektor bidang pembangunan dari 3 sektor itu yang utama dalam adalah bidang ekonomi, sosial (termasuk di dalamnya: bidang pendidikan, kesehatan dan sosial-budaya yang kesemuanya saling berkaitan satu sama lain.

Begitu pula Permendagri RI Nomor 7 tahun 2007 tentang kader pemberdayaan masyarakat, menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (pasal1 ayat 8)²²

Dari semua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan diarahkan pada akar persoalan yaitu meningkatkan kemampuan rakyat. Berikut ini tabel yang merupakan tinjauan hasil penelitian yang serupa dengan penelitian orang lain.

²¹ <http://www.scribd.com/doc/74143220/5/Dimensi-dan-Indikator-Pemberdayaan-Masyarakat>. (diakses pada tanggal 8 september 2012 pada pukul 13.00)

²² PERMENDAGRI RI NOMOR 7 TAHUN 2007 tentang KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, Bandung: Fokus Media

Tabel. 3
Tinjauan Hasil Penelitian Serupa

Judul	Lokasi	Metode	Hasil Penelitian
<p>Pemberdayaan anak jalanan melalui pelatihan bermusik pada sentra kreatifitas Pemuda (SKREAP)</p>	<p>Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung</p>	<p>Metode deskriptif dengan alat pengumpulan data utama angket di dukung dengan alat pengumpulan data lain seperti pedoman observasi, pedoman wawancara, studi literatur dan studi dokumentasi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Proses pemberdayaan sebagai upaya pemberian motivasi agar anak jalanan memiliki kepercayaan diri terhadap potensi yang dimilikinya, serta timbulnya kesadaran bahwa dengan keterampilan yang dimilikinya dapat meningkatkan taraf hidupnya, 2) Hasil pemberdayaannya setelah mengikuti kegiatan pelatihan bermusik warga belajar cukup mengetahui berbagai hal tentang musik. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pemanfaatan hasil pemberdayaan anak jalanan melalui pelatihan bermusik berkaitan dengan aspek pengetahuan, 3) Faktor penghambatnya antara lain: faktor lingkungan tempat tinggal yang kurang mendukung, kesehatan dan kejenuhan pada warga belajar, fasilitas yang kurang memadai. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu keyakinan warga belajar yang menyatakan bahwa dengan mengikuti pelatihan bermusik ini, mereka akan mendapatkan peningkatan terhadap pendapatan.

Tabel. 4
Persamaan dan Perbedaan dari Peneliti dengan
Hasil Tinjauan Penelitian Serupa

Judul	Lokasi	Metode	Persamaan	Perbedaan
Peranan Organisasi masyarakat Betawi dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Pondok Pesantren	Kap. Pedaengan Kecamatan Cakung/ Jakarta Timur	Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan alat pengumpulan data observasi, tehnik dokumentasi dan wawancara.	Meneliti tentang pemberdayaan anak jalanan, metode yang digunakan deskriptif dengan alat pengumpulan data observasi, tehnik dokumentasi dan wawancara	Peneliti meneliti dari aspek sosial-ekonomi dan pendidikan dengan kegiatan keterampilan dan pembinaan serta pemberdayaan melalui pondok pesantren sedangkan hasil tinjauan serupa meneliti dari aspek pengetahuan dengan pelatihan di bidang musik

Tabel di atas merupakan hasil penelitian orang lain, yang pada dasarnya untuk menambah khasanah perbandingan penelitian peneliti dengan orang lain. Karena jika pada judul memperlihatkan kesamaan dari segi fokus penelitian, yaitu tentang pemberdayaan anak jalanan, namun beda pada program yang dijalankannya.

Pada dasarnya kenapa bisa ada program pemberdayaan masyarakat karena ada bagian yang tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan dan mendinamisasikan segala potensinya serta

memberdayakannya, supaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemberdayaan tidak semata-mata hanya memenuhi kebutuhan dasar atau mengembangkan nilai ekonomi serta menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut, tetapi semuanya harus ditambahkan dengan nilai sosial dan nilai budaya serta pendidikan.

B.1 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Payne (1997) dalam bukunya *Modern Sosial Work Theory* menjelaskan bahwa pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.²³

Sedangkan menurut sunyoto tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/ kesenjangan/ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi atau layak. Kebutuhan itu mencakup, sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan

²³ Alfitri, *loc. cit*, h. 23

transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar tradisional karena digunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional.²⁴

Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani juga menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.²⁵

B.2 Proses Pemberdayaan Masyarakat

Memberdayakan masyarakat memerlukan rangkaian proses yang panjang (tidak seketika), agar mereka menjadi lebih berdaya. Proses pemberdayaan cenderung dikaitkan sebagai unsur pendorong sosial, ekonomi dan politik. Sejalan dengan pernyataan diatas tadi tentang pengertian & tujuan pemberdayaan masyarakat. Jadi, Pemberdayaan adalah suatu upaya dan proses bagaimana agar berfungsi sebagai *power* dalam pencapaian tujuan yaitu pengembangan diri.

²⁴ Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 24

²⁵ <http://www.sarjanaku.com/2011/09/pemberdayaan-masyarakat-pengertian.html>. (diakses pada tanggal 5 september 2012 pada pukul 15:47)

Unsur utama dari proses pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat.²⁶

Secara konseptual, pemberdayaan harus mencakup enam hal, yaitu:

1. *Learning by doing* (belajar dengan melakukan) Artinya, pemberdayaan adalah sebagai proses hal belajar dan ada suatu tindakan konkrit yang terus-menerus dampaknya dapat terlihat.
2. *Problem solving* (pemecahan masalah), pemberdayaan harus memberikan arti terjadinya pemecahan masalah yang dirasakan krusial dengan cara dan waktu yang tepat.
3. *Self evaluation* (evaluasi diri), pemberdayaan harus mampu mendorong seseorang atau kelompok tersebut untuk melakukan evaluasi secara mandiri.
4. *Self development and coordination* (pengembangan diri dan kordinasi), mendorong agar mampu melakukan pengembangan diri dan melakukan hubungan koordinasi dengan pihak lain secara lebih luas.
5. *Self selection* (seleksi diri), suatu kumpulan yang tumbuh sebagai upaya pemilihan dan penilain secara mandiri dalam menetapkan langkah ke depan.
6. *Self decisim* (keputusan diri), dalam memilih tindakan yang tepat hendaknya dimiliki kepercayaan diri dalam memutuskan sesuatu secara mandiri.²⁷

²⁶ Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 88

²⁷ Alfitri, *loc.cit.*

Azis (2005:135) juga merinci tahapan yang seharusnya dilalui dalam pemberdayaan. Pertama, membantu masyarakat dalam menemukan masalahnya. Kedua, melakukan analisis terhadap permasalahan tersebut secara mandiri. Ketiga, menentukan skala prioritas masalah, dalam arti memilih tiap masalah yang paling mendesak untuk di selesaikan. Keempat, mencari penyelesaian masalah yang sedang dihadapi, antara lain dengan pendekatan sosio kultural yang ada dalam masyarakat. Kelima, melaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Keenam mengevaluasi seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan itu untuk dinilai sejauh mana keberhasilan dan kegagalannya.²⁸

Proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan yang dapat disingkat 5P, ini merupakan indikator dari konsep pemberdayaan yang dijelaskan oleh (suharto,1997:218-219):

1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.
2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya.
3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari persaingan yang tidak seimbang.
4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas kehidupannya.
5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.²⁹

Jadi, pada dasarnya program pemberdayaan masyarakat itu ada dikarenakan masyarakat yang tidak berdaya akan kondisi kehidupan yang dihadapinnya, seperti; kondisi sosial-ekonomi dan pendidikan, maka dengan adanya pemberdayaan masyarakat, rakyat diharapkan bisa berdaya, bisa meningkatkan derajat mereka dengan kemampuan dan kemandirian yang mereka peroleh.

²⁸ Alfitri, *loc. cit.*

²⁹ Alfitri, *loc. cit.*

C. Pengertian Anak Jalanan

Istilah anak jalanan berkembang sedemikian rupa merambah berbagai lini. Mulai dari aspek sosial, ekonomi, dan pendidikan. Kehadiran anak jalanan merupakan sebuah hal yang niscaya bagi kota-kota besar di Indonesia. Keramaian dan gemerlap gedung megah serta mobil mewah telah menarik banyak anak untuk turut serta meramaikan sudut-sudut keramaian kota. Meski sering dikonotasikan negatif, namun pertumbuhan anak jalanan semakin pesat di berbagai kota. Bahkan keberadaannya menjadi sebuah ciri khas kerasnya kehidupan kota.

Menurut UNICEF anak jalanan, adalah *street child are those who have abandoned their homes, school and immediate communities before they are sixteen years of age. And have drifted into a nomadic street life.*³⁰

(Anak jalanan merupakan anak-anak dibawah umur 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat terdekatnya, larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah di jalan raya.)

Menurut Nugroho penggunaan istilah anak jalanan berimplikasi pada dua pengertian yang harus dipahami. *Pertama*, pengertian sosiologis, yaitu menunjuk pada aktifitas sekelompok anak yang keluyuran di jalan-jalan. Masyarakat mengatakan sebagai kenakalan anak, dan perilaku mereka dianggap mengganggu ketertiban sosial. *Kedua*, pengertian ekonomi, yaitu menunjuk pada aktifitas sekelompok anak yang terpaksa mencari nafkah di jalanan karena kondisi ekonomi orangtua yang miskin.³¹

³⁰ Oot, Hotimah, *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi (Anak Jalanan di kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan)* Vol.8 No.2, April 2009, h. 58

³¹ <http://benradit.wordpress.com/2012/05/10/definisi-anak-jalanan-dalam-ilmu-sosiologi/> (diakses pada tanggal 20 september 2012 pada pukul 19:20)

Lain halnya dengan Tata Sudrajat, menurutnya anak jalanan dapat di definisikan berdasarkan hubungan dengan orang tuanya :

1. Anak yang putus hubungan dengan orang tuanya, tidak sekolah dan tinggal dijalanan (anak yang hidup di jalanan)
2. Anak yang berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya, tidak sekolah, kembali ke orang tuanya seminggu sekali, dua minggu sekali, satu bulan sekali atau tiga bulan sekali (anak yang bekerja di jalanan)
3. Anak yang masih Sekolah atau sudah putus sekolah, kelompok ini masuk kategori anak yang rentan menjadi anak jalanan.³²

Diberbagai sudut kota, sering kita temui anak jalanan harus bertahan hidup dengan cara-cara yang sosial kurang atau bahkan tidak dapat diterima masyarakat umum hanya untuk sekedar menghilangkan rasa lapar dan keterpaksaan untuk membantu keluarganya. Tidak jarang pula mereka dicap sebagai pengganggu ketertiban dan membuat kota menjadi kotor sehingga pemerintah kota sering melakukan penertiban anak jalanan. Marginal, rentan dan eksploitatif adalah istilah-istilah yang sangat tepat untuk menggambarkan kondisi dan kehidupan mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang karirnya, kurang dihargai dan umumnya juga tidak menjanjikan prospek apapun dimasa depan. Rentan karena resiko yang harus ditanggung akibat jam kerja yang sangat panjang, dari segi kesehatan maupun sosial sangat rawan. Sedangkan disebut eksploitatif karena mereka biasanya memiliki posisi tawar menawar yang sangat lemah, tersubordinasi dan cenderung menjadi obyek perlakuan yang sewenang-wenang dari ulah preman atau oknum yang tidak bertanggung jawab.

C.1. Kategori Anak Jalanan

Menurut UNICEF yang dikutip oleh Lusk dalam Jurnal Of Sociology dan

³² Soedijarto, *Pemberdayaan Anak Jalanan*, 1988: 16 (diakses pada tanggal 12 oktober 2012 pukul 10:00).

social welfare yang menyebutkan bahwa anak jalanan dibagi dalam tiga kategori, yaitu:

- a) *Children on the street* (anak yang bekerja dijalanan), Yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka di jalan diberikan kepada orang tuanya. Fungsi anak jalanan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.
- b) *Children of the street* (anak yang hidup dijalan), Yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa di antara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekwensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena sebab biasanya kekerasan, lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosial, emosional fisik maupun seksual.
- c) *Children from families of the street* (anak dari keluarga yang hidup dijalanan), Yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Walaupun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing. Dari satu tempat ketempat lain dengan segala resikonya.³³

C.2. Ciri anak jalanan

Mulandar memberikan empat ciri yang melekat pada anak, sehingga digolongkan sebagai anak jalanan :

1. Berada ditempat umum (jalanan, pasar, pertokoan, tempat-tempat hiburan) selama 3-24 jam sehari.
2. Berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah, sedikit sekali yang tamat SD)
3. Berasal dari keluarga-keluarga tidak mampu (kebanyakan kaum urban,

³³ Departemen Sosial Direktorat Kesejahteraan anak, keluarga, dan lanjut usia, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat dalam Penanganan Anak Jalanan Berbasis Masyarakat*, (Jakarta: Depsos, 2001), h. 7-8.

beberapa diantaranya tidak jelas keluarganya).

4. Melakukan aktivitas ekonomi (melakukan pekerjaan pada sektor informal).³⁴

C.3. faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya anak jalanan adalah sebagai berikut:

1. Adanya konflik dalam keluarga
2. Tingkat ekonomi yang lemah
3. Pengaruh Lingkungan
4. Dekat dengan komunitas jalanan³⁵

D. Forum Betawi Rempug

Forum Betawi Rempug (FBR) adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang bersifat kedaerahan. Latar belakang pendirian Forum Betawi Rempug (FBR) adalah dikarenakan kondisi masyarakat betawi yang sangat memprihatinkan baik secara moral maupun intelektual. Dapat dikatakan masyarakat betawi tenggelam dalam kehidupan masyarakat kota Jakarta yang semakin hari semakin mengalami kemajuan yang pesat, baik secara fisik maupun secara modern. Forum Betawi Rempug (FBR) merupakan organisasi kemasyarakatan yang berasaskan Al-Qur'an, As'sunah, Pancasila dan undang-undang dasar 1945.³⁶

Forum Betawi Rempug (FBR) berdiri berawal dari sebuah Pondok Pesantren yang bernama Pondok Pesantren yatim ziyadatul muhtadi'ien. Dari

³⁴ Mulandari, Surya, *Dehumanisasi Anak Marjinal ; Berbagai Pengalaman Pemberdayaan*, (Bandung: Yayasan Akatiga, 1996), h. 112.

³⁵ Sri Sanituti dan Bagong Suyanto, *Anak Jalanan di Jawa Timur*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1991), h. 15.

³⁶ AD & ART Serta Garis-Garis Besar Program Forum Betawi Rempug (FBR): Anggaran Dasar Bab. II, Azas dan Landasan Pasal 3-4, (Cisarua, Jawa Barat: Pimpinan Pusat FBR, 2002)

Pondok Pesantren inilah organisasi ini berdiri. Jadi antara Forum Betawi Rempug (FBR) dengan Pondok Pesantren yatim ziyadatul mubtadi'ien tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan.

Organisasi ini mempunyai visi atau tujuan dan cita-cita “ membina masyarakat betawi yang bersatu, kreatif, inovatif, pencipta dan pengabdian yang berpribadian Islam serta bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.

Adapun usaha-usaha atau misi yang dimiliki Forum Betawi Rempug (FBR) adalah:

1. Membina hubungan persaudaraan yang kokoh diantara sesama masyarakat betawi dan masyarakat lainnya demi terciptanya kehidupan yang aman, nyaman, damai serta bahagia dunia dan akhirat.
2. Membina hubungan kerja sama dengan pemerintah dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat betawi melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan serta pembukaan lapangan pekerjaan.
4. Meningkatkan peranan masyarakat betawi dalam berbagai aspek kehidupan.
5. Melestarikan dan mengembangkan seni budaya betawi sebagai bagian dari kebudayaan nasional.
6. Membantu pelayanan masyarakat dibidang hukum.
7. Melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar.

Penelitian tentang Organisasi Masyarakat FBR (Forum Betawi Rempug) memberikan persamaan dan perbedaan dari segi aspek penelitian. Ini sejalan dengan penelitian dari Nurlaila mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial angkatan 2006 yang berjudul Peran Forum Betawi Rempug dalam Aspek Sosial Budaya Masyarakat Betawi. Jika Nurlaila meneliti tentang aspek Sosial Budayanya, maka peneliti meneliti dari

aspek Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang Sosial-ekonomi dan Pendidikan, walaupun Organisasi Masyarakat yang di teliti sama, yaitu FBR (Forum Betawi Rempug).

E. Pondok Pesantren

Sebelum tahun 1960'an, pusat-pusat pendidikan pesantren di Indonesia lebih dikenal dengan nama pondok.

Menurut Dhofier Istilah pondok berasal dari pengertian asrama-asrama para santri atau tempat tinggal yang dibuat dari bambu, atau berasal dari kata arab, funduq, yang artinya hotel atau asrama. Perkataan pesantren berasal dari kata santri, yang dengan awalan pe di depan dan akhiran an berarti tempat tinggal para santri.³⁷ Menyambung pendapat Dhofier, Profesor Johns berpendapat bahwa istilah santri berasal dari bahasa *tamil*, yang berarti guru mengaji. Dari asal-usul kata santri pula banyak sarjana berpendapat bahwa lembaga pesantren pada dasarnya adalah lembaga pendidikan keagamaan bangsa Indonesia pada masa menganut agama Hindu Budha yang bernama "*Mandala*" yang diislamkan oleh para kyai.³⁸

Sedangkan Menurut Yacub yg dikutip oleh Khozin mengatakan bahwa ada beberapa pembagian pondok pesantren dan tipologi yaitu :

- **Pesantren Salafi**, yaitu pesantren yg tetap mempertahankan pelajaran dgn kitab-kitab klasik dan tanpa diberikan pengetahuan umum. Model pengajarannyapun sebagaimana yg lazim diterapkan dalam pesantren salaf yaitu dgn metode sorogan dan weton.
- **Pesantren Khalafi**, yaitu pesantren yg menerapkan sistem pengajaran klasikal (madrasi) memberikan ilmu umum dan ilmu agama serta juga memberikan pendidikan keterampilan.
- **Pesantren Kilat**, yaitu pesantren yg berbentuk semacam training dalam waktu relatif singkat dan biasa dilaksanakan pada waktu libur sekolah. Pesantren ini menitik beratkan pada keterampilan ibdah dan kepemimpinan. Sedangkan santri terdiri dari siswa sekolah yg dipandang perlu mengikuti kegiatan keagamaan dipesantren kilat.

³⁷ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 2011), h. 41

³⁸ Ibid,

- **Pesantren terintegrasi**, yaitu pesantren yg lbh menekankan pada pendidikan vocational atau kejuruan sebagaimana balai latihan kerja di Departemen Tenaga Kerja dgn program yg terintegrasi. Sedangkan santri mayoritas berasal dari kalangan anak putus sekolah atau para pencari kerja.³⁹

Jadi, pondok pesantren adalah tempat tinggal para santri yang biasanya berada di asrama-asrama. Pesantren adalah lembaga pendidikan masyarakat yang pada dasarnya tidak mengembangkan sistem madrasah dalam penyelenggaraan pendidikannya. Jadi lebih bersifat informal, dalam arti masyarakat menikmati pembelajaran di dalam lembaga pesantren secara lues, tanpa batasan-batasan artifisial dan formal seperti usia dan latar belakang sosial lainnya. Tetapi, dalam perkembangannya dan ini karena pengaruh-pengaruh sistem sekolah modern. pesantren tidak hanya mempertahankan sistem pembelajaran informal, tetapi juga menganut sistem pembelajaran klasikal berupa madrasah.

³⁹ <http://blog.re.or.id/pondok-pesantren-sebagai-lembaga-pendidikan-islam.htm>. (diakses pada tanggal 10 oktober 2012 pukul 21:00).